

MATRIKS ANALISA DAN EVALUASI

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan norma dan istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan subjek penerima tunjangan kinerja 2. Kejelasan mekanisme pemberian dan penilaian 	<p>Secara umum, perumusan norma dalam Peraturan Menteri ini telah menggunakan bahasa hukum yang jelas dan sistematis. Subjek penerima tunjangan kinerja dirumuskan secara tegas sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi. Namun, dalam beberapa ketentuan terkait penilaian kinerja dan besaran tunjangan, norma masih bersifat umum dan bergantung pada kebijakan teknis lebih lanjut, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.</p>	<p>Perlu penguatan kejelasan norma melalui penjabaran lebih rinci dalam peraturan pelaksana atau pedoman teknis, khususnya terkait indikator penilaian kinerja dan mekanisme penyesuaian besaran tunjangan.</p>



Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
14 Januari 2026

Lina Widiyastuti, S.H., M.H., L.L.M
NIP. 197504142001122001

Lina Widiyastuti